BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi pendapatan pajak daerah sebelum pandemi untuk periode tahun 2018-2019 pada kota Pematangsiantar masih sangat efektif sesuai dengan Permendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, yaitu diatas 100% dari anggarannya. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2018-2019 yang lebih besar daripada target anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan pajak daerah lebih tinggi 15,86% daripada target anggarannya, di tahun 2019 realisasi pendapatan pajak daerah lebih tinggi 8,44% daripada target anggarannya.
2. Dampak covid-19 terhadap pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 menyebabkan target anggaran setiap pendapatan pajak daerah yang ada mengalami penurunan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota Pematangsiantar. Secara umum realisasi pendapatan per pajak daerah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2019, namun jika dilihat dari target anggaran tahun 2020 terdapat beberapa realisasi pendapatan pajak daerah yang meningkat, seperti pajak

reklame sebesar 11,93%, pajak air tanah juga sebesar 2,56%, dan pajak penerangan sebesar 3,66% dibandingkan dengan tahun 2019.

3. Dalam menangani dampak covid-19 terhadap sektor perpajakan yang ada di kota Pematangsiantar, BPKD Pematangsiantar mengeluarkan kebijakan agar dapat mempertahankan pendapatan sektor perpajakan dan membantu memulihkan perekonomian masyarakat kota Pematangsiantar. Kebijakan yang dikeluarkan seperti, penghapusan sanksi administratif, memaklumi masyarakat yang melaporkan omzet nihil akibat adanya PPKM selama masa pandemi covid-19, memberikan keringanan biaya listrik bagi pengguna 450 dan 900 VA, dan memperpanjang masa jatuh tempo pajak PBB dan BPHTB.